BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam skala makro setidaknya dunia abad ke-21 (sering disebut *knowledge society/ zaman now*) ditandai oleh enam kecenderungan penting, yaitu: (1) berlangsungnya revolusi digital yang semakin luar biasa yang mengubah sendi-sendi kehidupan, kebudayaan, peradaban, dan kemasyarakatan termasuk pendidikan, (2) terjadinya integrasi belahan-belahan dunia yang semakin intensif akibat internasionalisasi, globalisasi, hubungan-hubungan multilateral, teknologi komunikasi, dan teknologi transportasi, (3) berlangsungnya pendataran dunia (*the world is flat*) sebagai akibat berbagai perubahan mendasar dimensi-dimensi kehidupan manusia terutama akibat mengglobalnya negara, korporasi, dan individu, (4) sangat cepatnya perubahan dunia yang mengakibatkan dunia tampak berlari tunggang langgang, ruang tampak menyempit, waktu terasa ringkas, dan keusangan segala sesuatu cepat terjadi, (5) semakin tumbuhnya masyarakat padat pengetahuan (6), masyarakat informasi (*information society*), dan masyarakat jaringan (*network society*) yang membuat pengetahuan, informasi, dan jaringan menjadi modal sangat penting, dan makin tegasnya fenomena abad kreatif beserta masyarakat kreatif yang menempatkan kreativitas dan inovasi sebagai modal penting untuk individu, perusahaan, dan masyarakat. Keenam hal tersebut telah memunculkan tatanan baru, ukuran-ukuran baru, dan kebutuhan-kebutuhan baru yang berbeda dengan sebelumnya, yang harus

ditanggapi dan dipenuhi oleh dunia pendidikan nasional dengan sebaik-baiknya (Kemdikbud, 2016: 1).

Dalam skala mikro pendidikan, *zaman now* ditandai oleh adanya imperatif-imperatif global pendidikan, di antaranya pendidikan untuk semua (PUS), pendidikan bagi pembangunan berkelanjutan (ESD), tujuan pembangunan milenium (MDG's), dan literasi dunia bagi pemberdayaan. Selain itu, juga ditandai oleh munculnya temuan-temuan dan pemikiran-pemikiran baru yang berkenaan dengan dimensi tertentu pendidikan, di antaranya temuan neurosains pendidikan dan pembelajaran (misalnya hubungan otak dan belajar), munculnya pelbagai teori kecerdasan, tumbuhnya pemikiran baru pembelajaran (misalnya blended learning, mindful learning), dan kebijakan baru bidang pendidikan dan pembelajaran. Lebih jauh, juga muncul pergeseran peranan dan fungsi pendidikan dalam masyarakat, tugas pranata dan lembaga pendidikan, dan bentuk organisasional pendidikan serta keberadaan modal manusia dalam pendidikan. Hal tersebut menimbulkan konsekuensi tantangan, tuntutan, dan kebutuhan baru dalam sendi-sendi pendidikan termasuk sendi-sendi pendidikan nasional Indonesia.

Sementara itu, dalam skala regional dan nasional Indonesia, *zaman now* ditandai oleh berbagai perubahan mendasar yang paradigmatik. Selain reformasi pada penghujung abad ke-20, Indonesia memasuki abad ke-21 dengan sistem kenegaraan, pemerintahan, bahkan kemasyarakatan dan kebudayaan yang baru, misalnya orientasi baru pembangunan, desentralisasi, otonomi daerah, dan demokrasi serta bonus demografi. Di samping itu, memasuki abad ke-21 Indonesia mengalami keterbukaan dan interaksi global yang semakin intensif dan masif. Bagi Indonesia, bahkan tahun

2015 menjadi garis batas agenda berbagai kesepakatan dan kebijakan global dan nasional Indonesia di berbagai bidang baik bidang pendidikan maupun non-pendidikan. Berkenaan dengan bidang pendidikan, sebagai contoh, tahun 2015 merupakan tahun terakhir agenda kebijakan pendidikan untuk semua (*education for all*), tujuan pembangunan milenium (*milenium development goals*), dan agenda pendidikan nasional. Oleh karena itu, tahun 2015 menjadi tonggak penting urusan pemerintahan dan kemasyarakatan Indonesia, salah satunya urusan pendidikan nasional Indonesia.

Sehubungan dengan itu, sendi-sendi pendidikan nasional Indonesia perlu ditata kembali atau ditransformasikan sedemikian rupa supaya pendidikan nasional Indonesia semakin sanggup memberi kontribusi berarti bagi kiprah dan kemajuan Indonesia dalam abad ke-21 yang sudah mengalami perubahan mendasar yang paradigmatik sebagaimana telah disinggung di atas. Di samping itu, penataan kembali atau transformasi pendidikan nasional Indonesia itu diarahkan untuk memberikan tanggapan dan jawaban atas berbagai tantangan, tuntutan, dan kebutuhan baru sebagai konsekuensi berbagai keadaan yang sudah dipaparkan di atas. Hal ini menunjukkan bahwa penataan kembali atau transformasi pendidikan nasional Indonesia merupakan tugas sejarah (imperatif) yang harus dikerjakan secara sungguh-sungguh. Dikatakan demikian karena tiga alasan. Pertama, bangsa-bangsa di dunia yang sekarang mengalami kemajuan sangat berarti, misalnya Jepang, Singapura, Korea Selatan, Republik Rakyat Tiongkok, dan Finlandia, telah ditopang atau disangga oleh pendidikan yang baik, bermutu, dan maju. Dalam berbagai pemeringkatan pendidikan di aras global, misalnya *Learning Curve*, TIMSS (*Trends in International Mathematics*

and Science Study), dan PISA (*Programme for International Student Assessment*), negara-negara tersebut selalu menduduki peringkat atas. Kedua, pelbagai studi internasional dan nasional tentang pendidikan Indonesia memberikan justifikasi betapa mendesaknya transformasi pendidikan nasional Indonesia sekarang. Laporan-laporan Bank Dunia, UNDP, dan UNESCO tentang pendidikan Indonesia merekomendasikan transformasi secara terarah pendidikan nasional Indonesia supaya Indonesia mampu tumbuh dan berkembang dengan baik, terhindar dari jebakan-jebakan yang membawa aneka kemerosotan pada satu sisi dan pada sisi lain mampu memanfaatkan peluang-peluang yang terbuka. Ketiga, berbagai fakta dan bukti kinerja pendidikan nasional yang telah dipublikasikan oleh berbagai pihak mengamanatkan betapa mendesaknya penataan kembali atau transformasi pendidikan nasional Indonesia secara komprehensif dan sistemis.

Penataan kembali atau transformasi pendidikan nasional Indonesia tersebut dapat dimulai dengan menempatkan kembali karakter sebagai ruh atau dimensi terdalam pendidikan nasional berdampingan dengan intelektualitas yang tercermin dalam kompetensi. Dengan karakter yang kuat, tanggung jawab yang tinggi beserta kompetensi yang tinggi, yang dihasilkan oleh pendidikan yang baik, pelbagai kebutuhan, tantangan, dan tuntutan baru yang disebut di atas dapat dipenuhi atau diatasi. Oleh karena itu, selain pengembangan intelektualitas, pengembangan karakter peserta didik sangatlah penting atau utama dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Dikatakan demikian karena pada dasarnya pendidikan bertujuan mengembangkan potensi-potensi intelektual dan karakter peserta didik. Hal ini telah ditandakan oleh berbagai pemikiran tentang pendidikan dan berbagai peraturan

perundang-undangan tentang pendidikan. Sebagai contoh, beberapa puluh tahun lalu Ki Hadjar Dewantara, bapak pendidikan Indonesia, telah menandakan secara eksplisit bahwa “Pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (*intellectual*) dan tubuh anak. Bagian-bagian itu tidak boleh dipisahkan agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup anak-anak kita” (Karya Ki Hadjar Dewantara Buku I: Pendidikan). Demikian juga laporan Delors untuk pendidikan abad XXI, sebagaimana tercantum dalam buku Pembelajaran: Harta Karun di Dalamnya, menegaskan bahwa pendidikan abad XXI bersandar pada lima tiang pembelajaran sejagat (*five pillar of learning*), yaitu *learning to know*, *learning to do*, *learning to live together*, dan *learning to be* serta *learning to transform for oneself and society*.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) juga terpapar secara tersurat berbagai kompetensi yang bersangkutan dengan karakter di samping intelektualitas. Hal tersebut menandakan bahwa sesungguhnya pendidikan bertugas mengembangkan karakter sekaligus intelektualitas berupa kompetensi peserta didik.

Melihat begitu pentingnya pendidikan karakter dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional, maka pemerintah menerbitkan peraturan yang terkait dengan itu, salah satunya adalah Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Peraturan tersebut menuntut guru untuk melakukan penguatan karakter siswa yang menginternalisasikan nilai-nilai utama PPK yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong-royang dan integritas dalam setiap kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Selain itu, untuk membangun generasi emas Indonesia, maka perlu dipersiapkan peserta didik yang memiliki keterampilan abad ke-21 seperti khususnya keterampilan berpikir kritis dan memecahkan masalah (*critical thinking and problem solving skills*), keterampilan untuk bekerjasama (*collaboration*) kemampuan untuk berkekrativitas (*creativity*), dan kemampuan untuk berkomunikasi (*commnication*). Penguatan Pendidikan Karakter merupakan *platform* pendidikan nasional yang memperkuat Kurikulum 2013. dengan demikian perkembangan Kurikulum 2013 tahun 2018 ini telah mengintegrasikan tiga strategi implementasi Penguatan Pendidikan Karakter yaitu pendidikan karakter berbasis kelas, pendidikan karakter berbasis budaya sekolah, dan pendidikan karakter berbasis masyarakat sehingga implementasi Kurikulum 2013 menjadi bagian integral dalam penguatan pendidikan karakter, kecakapan literasi, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi (*high order thinking skills/HOTS*).

Peraturan tersebut juga diperkuat oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal serta Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 097/D/HK/2019 tentang Pedoman Teknis

Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal. Dalam peraturan ini ditegaskan bahwa sekolah atau satuan Pendidikan menyelenggarakan penguatan pendidikan karakter melalui pembiasaan 5 nilai utama PPK di sekolah termasuk di dalamnya adalah jenis kegiatan yang dilakukan sekolah. Semua mengindikasikan bahwa penguatan Pendidikan karakter pada satuan Pendidikan sangat penting.

Gerakan penguatan pendidikan karakter menjadi semakin mendesak diprioritaskan karena berbagai persoalan yang mengancam keutuhan dan masa depan bangsa seperti maraknya tindakan intoleransi dan kekerasan atas nama agama yang mengancam kebinekaan dan keutuhan NKRI, munculnya gerakan-gerakan separatis, perilaku kekerasan dalam lingkungan pendidikan dan di masyarakat, kejahatan seksual, tawuran pelajar, pergaulan bebas dan kecenderungan anak-anak muda pada narkoba. Selain persoalan yang mengancam keutuhan dan masa depan bangsa, Indonesia juga menghadapi tantangan menghadapi persaingan di pentas global, seperti rendahnya indeks pembangunan manusia Indonesia mengancam daya saing bangsa, lemahnya fisik anak-anak Indonesia karena kurang olah raga, rendahnya rasa seni dan estetika serta pemahaman etika yang belum terbentuk selama masa pendidikan. Berbagai alasan ini telah cukup menjadi dasar kuat bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk kembali memperkuat jati diri dan identitas bangsa melalui gerakan nasional pendidikan dengan meluncurkan Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang akan dilakukan secara menyeluruh dan sistematis pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Program penguatan Pendidikan karakteri pada satuan pendidikan sudah disosialisasikan mulai tahun 2013 melalui penerpan kurikulum 2013. Implementasi pada satuan pendidikan PPK berbasis kelas, PPK berbasis budaya sekolah, dan PPK berbasis masyarakat. Ketiga dimensi implementasi PPK pada satuan pendidikan diharapkan dapat membentuk siswa yang cerdas dan berkarakter. Namun kenyataannya masih ditemukan hal-hal negatif dalam pendidikan, persoalannya adalah hingga saat ini sumber daya manusia Indonesia masih belum mencerminkan cita-cita pendidikan yang diharapkan. Misalnya untuk kasus-kasus aktual, masih banyak ditemukan siswa yang menyontek di kala sedang menghadapi ujian, bersikap malas, tawuran antar sesama siswa, melakukan pergaulan bebas, terlibat narkoba, dan lain-lain.

Di sisi lain, ditemukan guru, pendidik yang senantiasa memberikan contoh-contoh baik ke siswanya, juga tidak kalah mentalnya. Misalnya guru tidak jarang melakukan kecurangan-kecurangan dalam sertifikasi dan dalam ujian nasional (UN). Kondisi ini terus terang sangat memilukan dan mengkhawatirkan bagi bangsa Indonesia yang telah merdeka sejak tahun 1945. Memang masalah ini tidak dapat digeneralisir, namun setidaknya ini fakta yang tidak boleh diabaikan karena kita tidak menginginkan anak bangsa kita kelak menjadi manusia yang tidak bermoral sebagaimana saat ini sering kita melihat tayangan TV yang mempertontonkan berita-berita seperti pencurian, perampokan, pemerkosaan, korupsi, dan penculikan, yang dilakukan tidak hanya oleh orang-orang dewasa, tapi juga oleh anak-anak usia belasan. Hasil evaluasi yang dilakukan LPMP Bali tahun 2017 dan 2018 menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah menerapkan PPK tanpa adanya program yang jelas sehingga

belum tampak hasilnya secara maksimal. Untuk itu diperlukan evaluasi secara komprehensif implementasi penguatan pendidikan karakter pada satuan Pendidikan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasi permasalahan tentang implementasi penguatan pendidikan pada satuan pendidikan diuraikan sebagai berikut.

1. Warga sekolah belum semuanya memahami tentang regulasi yang berkaitan dengan PPK, hal ini disebabkan karena minimnya sosialisasi yang dilakukan kepala sekolah kepada warga sekolah.
2. Sekolah menerapkan PPK berdasarkan regulasi yang ada, tanpa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi sekolah, sehingga terkesan sangat sulit diterapkan.
3. Penerapan PPK di sekolah kecenderungan sifatnya pembiasaan tanpa program yang jelas sehingga sangat sulit untuk mengukur indikator keberhasilan.
4. PPK berbasis kelas dilakukan oleh guru sebatas tertulis di RPP sehingga implementasi dalam pembelajaran kurang optimal.
5. PPK berbasis budaya sekolah diterapkan hanya kepada siswa, warga sekolah lainnya luput dari program itu.
6. Masyarakat kurang dilibatkan dalam implementasi PPK pada satuan Pendidikan sehingga kurang mendorong masyarakat mengatualisasikan PPK di rumah dan di masyarakat.
7. Belum pernah dilakukan evaluasi secara menyeluruh tentang program PPK melalui model CIPP.

1.3 Pembatasan Masalah

Berkaitan dengan luasnya ruang lingkup pelaksanaan PPK pada satuan pendidikan, maka perlu adanya pembatasan. Penelitian evaluasi ini akan dilakukan menggunakan evaluasi model CIPP (konteks, input, proses dan produk), tidak melihat dampak yang ditimbulkan oleh program PPK, karena program sedang berjalan belum signifikan dapat dilihat dampaknya.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan penguatan Pendidikan karakter pada satuan pendidikan seperti yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Berapa efektif komponen konteks (*context*) mendukung pelaksanaan program penguatan pendidikan karakter di SMP Negeri 1 Tabanan?
2. Berapa efektif komponen input (*input*) mendukung pelaksanaan program penguatan pendidikan karakter di SMP Negeri 1 Tabanan?
3. Berapa efektif komponen proses (*process*) mendukung pelaksanaan program penguatan pendidikan karakter di SMP Negeri 1 Tabanan?
4. Berapa efektif komponen produk (*product*) mendukung pelaksanaan program penguatan pendidikan karakter di SMP Negeri 1 Tabanan?

1.5 Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program penguatan pendidikan karakter di SMP Negeri 1 Tabanan dilihat

berfungsinya kompoenen konteks, input, proses dan produk. Secara rinci tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan efektivitas komponen konteks dalam mendukung pelaksanaan program penguatan pendidikan karakter di SMP Negeri 1 Tabanan.
2. Mendeskripsikan efektivitas komponen input dalam mendukung pelaksanaan program penguatan pendidikan karakter di SMP Negeri 1 Tabanan.
3. Mendeskripsikan efektivitas komponen proses dalam mendukung pelaksanaan program penguatan pendidikan karakter di SMP Negeri 1 Tabanan.
4. Mendeskripsikan efektivitas komponen produk dalam mendukung pelaksanaan program penguatan pendidikan karakter di SMP Negeri 1 Tabanan.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat yang dapat dipetik dari hasil penelitian ini secara umum adalah memberikan sumbangan pemikiran kepada pengambil kebijakan khususnya Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Dinas Pendidikan maupun SMP Negeri 1 Tabanan dalam rangka perumusan kebijakan tentang implementasi PPK. Secara rinci manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

1.6.1 Manfaat Teoretis

1. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi bahan pengkajian dalam pelaksanaan program penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan. Hasil penelitian ini memperkuat apa yang dinyatakan

Stufflebeam (1986) yang menyatakan bahwa evaluasi model CIPP (*context, input, process and product*) dapat digunakan untuk mengambil keputusan suatu program. Dengan demikian, sangatlah tepat bahwa dalam mengevaluasi program PPK pada satuan pendidikan dengan model CIPP dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan terhadap efektivitas program tersebut.

2. Memperoleh konstruksi baru penerapan program PPK pada satuan Pendidikan baik dari aspek teoretis maupun implementatif.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi SMP Negeri 1 Tabanan

Hasil penelitian ini memberikan gambaran tentang implemntasi PPK dengan model CIPP. Gambaran ini menjadi refleksi untuk terus meningkatkan kualitas implementasi penguatan pendidikan karakter untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan dalam memfasilitasi peningkatan mutu sekolah memlaui program penguatan Pendidikan karakter pada satuan pendiidkan khususnya SMP Negeri 1 Kabupaten Tabanan.